

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Resistensi

Resistensi Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020 :645) Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan pengamanan untuk *survie*, meskipun seringkali resistensi juga menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena Bentuk dari resistensi itu sendiri berbeda – beda. Ada hanya untuk sekedar tidak ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut atau berusaha menjauhinya.

Menurut Septiana, D., (2019:75). Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.

Menurut Matsumoto dalam Handoyo (2021:139) menyatakan bahwa “resistensi adalah suatu proses menentang, melawan, atau bertahan dari sesuatu atau orang lain”.

Resistensi pedagang kaki lima kemudian bukan di temukan dalam individu, tetapi dalam persepsi dibangun oleh individu. Partisipan yang mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas – batas norma serta nilai – nilai tatanan dalam masyarakat itu sendir. Hasilnya mereka menempuh tindakan yang berbeda dan menunjukan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah membantu memahami sifat resistensi dan menggambarkan bahwa resistensi dapat menjadi reaksi yang wajar dari individu atau kelompok ketika mereka merasa terancam oleh perubahan atau kebijakan yang diberlakukan. Penting untuk diingat bahwa tingkat dan bentuk resistensi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik dari perubahan atau ancaman yang dihadapi.

2.1.2 Jenis-Jenis Resistensi

Menurut Handoyono (2021) Resistensi Pasif menyatakan bahwa jenis resistensi ini ditandai dengan perilaku Pedagang Kaki Lima yang menolak kebijakan Pemerintah atau mempertahankan *status quo* tanpa menunjukkan perlawanan secara terbuka. Hal ini mungkin terlihat dalam ketidak aktifan, ketidak pedulian, atau penolakan diam terhadap Kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa resistensi ini mencirikan pedagang kaki lima yang tidak secara terbuka menentang atau melawan kebijakan pemerintah, tetapi mereka menunjukkan penolakan atau ketidak setujuan secara tidak langsung melalui perilaku seperti: ketidak suka terhadap kebijakan: menyatakan bahwa ketidak sukaan terhadap perubahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Manusia cenderung memiliki zona nyaman, dan ketika ada kebijakan pemerintah yang merubah kondisi atau rutinitas yang biasa, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa tidak nyaman atau khawatir dengan kebijakan tersebut.

Kejutan dan ketakutan yang tidak di ketahui : Ketidak pastian atas perubahan atau akibat dari kebijakan yang tidak diketahui dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang dapat memicu resistensi. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa hasil perubahan tidak dapat diprediksi atau tidak diketahui sepenuhnya, mereka mungkin lebih cenderung menolak kebijakan tersebut. muncul tidak rasa percaya: individu atau masyarakat merasa bahwa tujuan atau alasan di balik

kebijakan tidak transparan atau tidak dapat dipercaya, maka rasa tidak percaya ini dapat menjadi pemicu resistensi. Kepercayaan adalah elemen penting dalam membangun dukungan terhadap perubahan. Rasa takut akan kegagalan : Rasa takut akan kegagalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi resistensi. Jika pedagang merasa bahwa kebijakan berpotensi menyebabkan kegagalan atau kerugian bagi mereka, mereka mungkin enggan atau menentang perubahan tersebut. Merasa tidak nyaman tidak mendapat kepastian: Ketidakpastian dan ketidakjelasan seputar perubahan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pemerintah atau masyarakat. Kekhawatiran akan hilangnya kepastian atau stabilitas dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

2.1.3 Tujuan Resistensi Pedagang Kaki Lima

Menurut Septiana, D., (2019:9) bahwa tujuan resistensi pedagang kaki lima ada beberapa yaitu: Melindungi mata pencaharian dan eksistensi usaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk melindungi mata pencaharian mereka dan eksistensi usaha mereka dari perubahan atau kebijakan yang dapat mengancam usaha mereka.

Mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan Resistensi untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha mereka yang dianggap terancam oleh kebijakan atau peraturan baru.

Menentang ketidakadilan dan diskriminasi: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau diskriminatif terhadap sektor informal.

Menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk mendapatkan keterlibatan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada usaha mereka. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk memperjuangkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam ekonomi dan perlindungan hukum yang memadai.

2.1.4 Indikator Resistensi Pedagang Kaki Lima

1. Menurut (Smith, J., & Doe., 2019: 26) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Tindakan formal yang diambil oleh pemerintah, yang mencakup undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, dan kebijakan terdokumentasi lainnya. Transparansi mengacu pada kejelasan dan keterbukaan dalam semua aspek pengambilan keputusan pemerintah. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa keputusan tertentu diambil, dan bagaimana proses tersebut berlangsung.

Dengan transparansi, masyarakat dapat lebih memahami motif dan alasan di balik kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam tindakan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas Kebijakan dan melakukan penyesuaian atau perbaikan bila diperlukan, memastikan bahwa Kebijakan terus bertindak demi kepentingan terbaik Masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, pengambilan keputusan dapat menjadi lebih Holistik dan Mendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan.

2. Menurut (Oreg, Vakola, *et all*, 2019 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka.

Ketika pedagang Kaki Lima merasa bahwa kebijakan Pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kaki lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Menurut Dawson, P. (2020) menyatakan bahwa indikator resistensi adalah “Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan: Individu atau kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidaksetujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang berlangsung dalam

organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menekankan pentingnya memahami persepsi dan pandangan pedagang kaki lima tentang Kebijakan Pemerintah. Penolakan terhadap Kebijakan dapat menjadi isyarat penting bagi Pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi dari kelompok usaha tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan konsekuensi dari tindakan formal yang diambil dalam merumuskan Kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.1.5 Faktor – Faktor Resistensi Pedagang Kaki Lima

Menurut para ahli Cynthia S. (2019) ada beberapa faktor – faktor Resistensi pedagang kaki lima yaitu:

1. Peraturan dan Hukum: Regulasi yang ketat atau peraturan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini terutama berlaku jika ada larangan atau batasan pada lokasi penjualan atau kegiatan mereka.
2. Penegakan Hukum: Jika penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berlebihan atau sewenang-wenang, hal ini bisa menjadi faktor resistensi karena dapat menyulitkan mereka untuk beroperasi dan mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka.
3. Persaingan dan Urbanisasi: Perkembangan kota dan persaingan bisnis dapat menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi, mempengaruhi pendapatan, dan memperumit akses ke lokasi penjualan yang menguntungkan.
4. Akses ke Sumber Daya: Keterbatasan akses ke modal, bahan baku, atau infrastruktur yang diperlukan untuk usaha pedagang kaki lima dapat menyulitkan mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka.

5. Stigma Sosial: Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap pedagang kaki lima, yang dapat menyebabkan stigma sosial dan mengurangi dukungan dari masyarakat atau pemerintah.
6. Ketidakpastian Ekonomi: Fluktuasi ekonomi atau krisis dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.
7. Ketersediaan Ruang Publik: Masalah mengenai akses dan izin untuk menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan juga dapat menjadi faktor resistensi bagi pedagang kaki lima.
8. Teknologi dan Perubahan Perilaku Konsumen: Perubahan tren teknologi dan perilaku konsumen juga dapat berdampak pada cara pedagang kaki lima beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan.

Dalam menghadapi faktor-faktor resistensi ini, pedagang kaki lima harus mengembangkan strategi adaptasi dan inovasi untuk tetap bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah. Selain itu, upaya pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan usaha pedagang kaki lima.

2.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Nugroho dalam Fauziah (2024:56) pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Menurut Damsar dalam Fauziah (2024:56) Pedagang kaki lima (Sektor informal adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagangan perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahannya menggunakan tempat – tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain – lain sebagainya.

Menurut Sinambela, (2019:14) Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor iformal.

Pedagang kaki lima adalah orang - orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang – barang (jasa – jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut pada tempat – tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang iformal

Pedagang kaki lima adalah sebagai yaitu orang – orang yang menawarkan barang – barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalur pejalan kaki di pinggir jalan ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima. Dari beberpa menurut para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa PKL adalah kelompok pedagang yang beroperasi di lingkungan informal dan sering menggunakan tempat-tempat fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Meskipun mereka bekerja dalam sektor informal dan menggunakan modal yang terbatas, PKL memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dan memberikan kontribusi dalam sektor perdagangan di lingkungan perkotaan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh PKL serta memberikan dukungan dan regulasi yang tepat untuk memfasilitasi kelangsungan usaha mereka.

2.2.1 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) Selain itu Karafir dalam Zumrotus (2018:46) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir dalam Zumrotus (2018:46) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu: Pedagang sayur, Pedagang cabe, Pedagang ikan, Pedagang Ubi.

larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, di jalan pinggir jalan umum, atau halte-halte dan tempat keramaian orang. Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gree dan Yeung dalam Novita, (2019) bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Menurut Novita (2019), adalah sebagai berikut:

1. Gerobak/kereta dorong Bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.
2. Warung semi permanen Terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
3. Kios Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
4. Jongko/meja Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

5. Gelaran/alas Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static).

Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang - barang dan makanan. Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan perizinan.
2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil
4. menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi
5. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat
6. Pedagang buah-buaha.
7. Pedagang Tahu, Tempe dan Tauge

2.2.2 Kebijakan Pada Pedagang Kaki Lima

Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksana suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya.

Menurut Suharto, Edi (2020: 86), Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Menurut Weible dan Sabatier (2017: 4), kebijakan adalah "rangkaiannya tindakan dan keputusan formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarahkan perilaku dan hasil kebijakan tertentu."

Menurut Dunn (2019: 21), kebijakan merupakan "suatu tindakan yang diambil atau dipilih oleh penguasa (atau oleh kelompok penguasa) dari

suatu alternatif, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu, berdasarkan atas suatu nilai atau keyakinan tertentu."

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau pernyataan formal dan informal yang diambil oleh pemerintah, kelompok, atau individu untuk mengarahkan perilaku dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu. Kebijakan bisa bersifat formal, seperti peraturan, undang-undang, atau keputusan pemerintah, maupun informal, seperti panduan, arahan, atau pernyataan dari kelompok atau individu.

2.3 Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan berpendapat bahwa terkait dengan implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi suatu kebijakan ada faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi, sehingga dimungkinkan tujuan kebijakan menjadi mudah atau sulit dicapai. Banyak teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan model. Teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C Edwards III

George C Edwards III dalam Siregar, Nurmayana (2022:3), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

a. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya.

Walupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber dayatersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi atau Sikap-Sikap.

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standart Operating Procedure* = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Siregar, Nurmayana (2022:4) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari Prosesnya.

Dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang dirancang dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b. Apakah Tujuan Kebijakan Tercapai.

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

1. *Impact* atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang terkait dengan formulasi kebijakan.

Isi kebijakan (*content of policy*) yang mempengaruhi proses implementasi adalah:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*).

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan.

2. Tipe manfaat (*type of benefits*).

Suatu kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang dirasakan itu dapat terbagi maupun tidak terbagi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*).

Maksudnya seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan, harus ada skala yang jelas untuk pencapaiannya.

4. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*).

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan

berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. Pelaksana program (*program implementors*).

Harus sudah terdata dan terpapar pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel untuk menjalankan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang berperan dominan sebagai implementor, kinerjanya secara internal akan ditentukan oleh kapasitas organisasi yang dimilikinya.

6. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*).

Pelaksana kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya (*resource*) berkaitan dengan aset yang perlu dimiliki organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (*raw material*) yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional.

Lingkungan Implementasi (*context of implementation*), meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.
2. Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa (*institution and regim characteristics*). Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya.

Karenanya perlu dikenali karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*). Maksudnya, sejauh mana kepatuhan dan respon para pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3. Teori Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Siregar, Nurmayana (2022:6) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu:

- a. Karakteristik masalah, meliputi:
 - 1) Ketersediaan teknologi dan teori kausal
 - 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - 3) Sifat populasi
 - 4) Derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, meliputi:
 - 1) Kejelasan/konsistensi tujuan atau sasaran;
 - 2) Teori kausal yang memadai;
 - 3) Sumber keuangan yang mencukupi;
 - 4) Integrasi organisasi pelaksana;
 - 5) Diskresi pelaksana;
 - 6) Rekrutmen dari pejabat pelaksana;
 - 7) Akses formal pelaksana ke organisasi lain

c. Faktor-faktor diluar (non) peraturan, meliputi:

- 1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
- 2) Perhatian terhadap masalah kebijakan;
- 3) Dukungan publik;
- 4) Sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama;
- 5) Dukungan kewenangan;
- 6) Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Model ini terkesan sangat menganggap suatu implementasi kebijakan akan efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Model ini disebut *model top-down*.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini Menjadi salah satu referensi penulis selama penelitian, sehingga merugikan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam peneliti ini. Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan nama yang sama persis dengan penelitian penulis. Namun demikian, penulis mengutip beberapa judul penelitian sebagai referensi ketika memperkaya bahan penelitian dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa jurnal penelitian terdahulu atau tesis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.

1. Benjamin Universitas Atman Jaya Yogyakarta (2013), dengan judul “Peran Pedagang Kaki Lima dalam pengelolaan sebagai upaya pengendalian pencemaran Lingkungan kawasan maliboro Kota Yogyakarta. Membahas Keberadaan Bisnis Pedagang Kaki Lima yang di jalan pada tantangan kota. Lebih menekankan pada Peran Pedagang Kaki Lima dalam pengelolaan limbah agar lingkungan sekitar tidak tercemar.
2. Nur’Ainani Marsonno Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2015) dengan judul Praktek Pedagang Kaki Lima di kawasan Nol kilometer maliboro yogyakarta tinjauan dari segi yuridis dan hukuman Daerah. Membahas tentang keberadaan

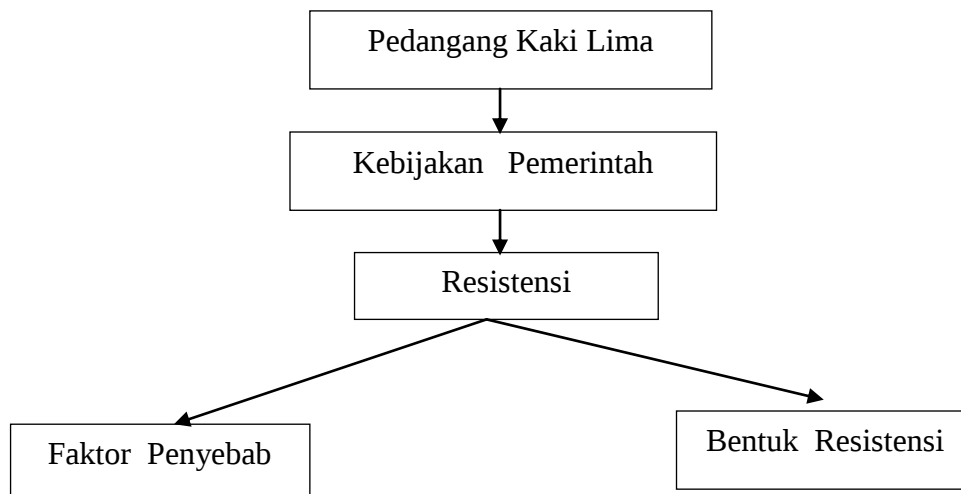
Pedagang Kaki Lima di kawasan tantangan. Lebih mengkhususkan pada tinjauan yuridis pada peraturan.

3. Panca (2011) dengan judul “ Resistensi Pedagang Pasar sumber Arta Bekasi Barat” penelitian ini membahas Faktor penyebab resistensi pedagang pasar Sumber arta, mengetahui bentuk – bentuk resistensi pedagang pasar terhadap penggusuran Pasar sumber arta. Resistensi Pedagang Pasar terhadap penggusuran yang terjadi di pasar Sumber Arta dilakukan dalam dua bentuk resistensi yaitu resistensi tertutup dan resistensi semi terbuka. Faktor penyebab Resistensi Pedagang Pasar yaitu:masa hak pakai yang telah berahir, janji pengelolaan yang belum terealisasi.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual pada resistensi pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli di Pasar Beringin yang menjadi salah satu sasaran bagi para Pedagang Kaki Lima

atas lokasi berjualan di atas trotoar dan pinggir jalan. Dimana aktivitas Pedagang Kaki Lima melihat adanya potensi daya jual lebih terakses kepada pembeli. Akibat dari aktivitas Pedagang Kaki Lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, lingkungan dan ketentraman umum yang melewati tempat tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 35 tentang Pedagang Kaki Lima. tetapi masih banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda tersebut. Penetiban terus-menerus dilakukan oleh petugas Satpol PP tapi hal ini tidak membuat Pedagang Kaki Lima jera justru sebaliknya Pedagang Kaki Lima semakin banyak, diantaranya ada di Pasar Berigin. Para pedagang berharap agar mereka tetap eksis atau tetap ada ditengah masyarakat oleh sebab itu para Pedagang Kaki Lima melakukan tindakan resistensi terhadap pemerintah Kota Gunungsitoli.